

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

A. Abdurrahman, 1999, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradya Paramita, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

J. Satrio, 2020, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Sinungan. 1995. *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara.

Moch. Isnaeni, *Peran Hukum Jaminan Kebendaan Dalam Bisnis Perbankan*, Diskusiritaarme (Jakarta: Diskusi Rita Arme, 2021).

Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2022. *Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Jakarta: Kencana.

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusuma, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia* Depok: Rajawali Pers

### B. Peraturan Perundang-Undangan

digunakan adalah :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Dalam Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 35/POJK/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online system).

### C. Jurnal

Pengadilan Negeri Tukungagung, Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil, 2019, diakses dari <https://pn-tulungagung.go.id/beranda/utama/informasi/mekanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusi-riil> pada 03 Mei 2024.

Rektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019, diakses dari <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2210-jaminan-fidusia-harus-berkepastian-hukum> pada 10 Juni 2024.

Rektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019, diakses dari <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8059150/direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum/pendaftaran-jaminan-fidusia#:~:text=Permohonan%20diajukan%20oleh%20Penerima%20Fidusia,jaminan%20fidusia%2C%20meliputi%3A%20a> Pada 15 Juni 2024.

